



## BUPATI REMBANG

### PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR 28 TAHUN 2011

#### TENTANG

#### INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Rembang perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Rembang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);
11. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Susunan Organisasi dan Tata Kerja Menteri Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Susunan Organisasi dan Tata Kerja Menteri Negara;
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER / 9 /M .PAN / 5 / 2 0 0 7 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 90);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG.

**Pasal 1**

Indikator Kinerja Utama Kabupaten Rembang merupakan alat untuk

mengukur keberhasilan pencapaian Sasaran Strategis Pemerintah Kabupaten Rembang.

## Pasal 2

- 1) Sasaran Strategis Pemerintah Kabupaten Rembang meliputi :
  - a. Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang berkualitas;
  - b. Terwujudnya kesejahteraan masyarakat;
  - c. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik;
  - d. Terwujudnya kemandirian daerah;
  - e. Terwujudnya pembangunan daerah yang progresif.
- 2) Untuk mencapai Sasaran Strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan Indikator Kinerja Utama sebagai berikut :
  - a. meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM);
  - b. meningkatnya IPG/GDI (Gender Developmen Indeks);
  - c. meningkatnya Angka Partisipasi Kasar (APK);
  - d. meningkatnya Angka Partisipasi Murni (APM);
  - e. meningkatnya jumlah prestasi kepemudaan dan olah raga.
- 3) Untuk mencapai Sasaran Strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan Indikator Kinerja Utama sebagai berikut :
  - a. meningkatnya PDRB/PDRB Perkapita;
  - b. menurunnya tingkat pengangguran;
  - c. menurunnya angka kemiskinan;
  - d. terkendalinya laju pertumbuhan penduduk;
  - e. meningkatnya indek gini/williamson;
  - f. menurunnya angka PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial);
  - g. meningkatnya persentase rumah layak huni;
  - h. meningkatnya Rasio elektrifikasi.
  - i. Meningkatnya tingkat kreativitas dan inovasi masyarakat dibidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK).
- 4) Untuk mencapai Sasaran Strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan Indikator Kinerja Utama sebagai berikut :
  - a. meningkatnya IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat);
  - b. meningkatnya jumlah unit pelayanan publik yang ber standar internasional;
  - c. meningkatnya peran partisipasi masyarakat dalam pemilu;
  - d. meningkatnya kualitas web site pemerintah Kabupaten Rembang;
  - e. menurunnya jumlah kasus dan besaran korupsi;
  - f. menurunnya angka kriminalitas;
  - g. menurunnya jumlah gangguan Kamtibmas;
  - h. meningkatnya kualitas lingkungan hidup;
  - i. meningkatnya kompetensi aparatur pemerintah.
- 5) Untuk mencapai Sasaran Strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditetapkan Indikator Kinerja Utama sebagai berikut :
  - a. meningkatnya kapasitas Fiskal;
  - b. meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD);
  - c. meningkatnya tingkat ketahanan pangan;
  - d. menurunnya ICOR.
- 6) Untuk mencapai Sasaran Strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e ditetapkan Indikator Kinerja Utama sebagai berikut :
  - a. meningkatnya jumlah investasi;
  - b. meningkatnya persentase jalan dalam kondisi baik;
  - c. meningkatnya persentase jembatan dalam kondisi baik;
  - d. meningkatnya persentase ketersediaan dan kebutuhan air baku;
  - e. meningkatnya jumlah perusahaan skala besar;

- f. meningkatnya jumlah produksi perikanan tangkap;
- g. meningkatnya nilai ekspor produksi lokal;
- h. meningkatnya pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
- i. meningkatnya pelestarian seni dan cagar budaya.

### Pasal 3

Indikator Kinerja Utama Kabupaten Rembang sebagaimana pasal 2 digunakan sebagai dasar untuk :

- a. Perencanaan Jangka Menengah;
- b. Perencanaan Tahunan;
- c. Perencanaan Anggaran;
- d. Perencanaan Dokumen Penetapan Kinerja;
- e. Pengukuran Kinerja;
- f. Pelaporan Akuntabilitas Kinerja;
- g. Pemantauan dan Pengendalian Kinerja Pelaksanaan Program dan Kegiatan.

### Pasal 4

- (1) Dalam rangka mengukur keberhasilan pencapaian Sasaran Strategis masing-masing SKPD ditetapkan Indikator Kinerja Utama SKPD;
- (2) Indikator Kinerja Utama SKPD dimaksud ayat (1) tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang

Ditetapkan di Rembang  
pada tanggal 31 Mei 2011



Diundangkan di Rembang  
pada tanggal 31 Mei 2011

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN REMBANG



BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2011 NOMOR 28

**INDIKATOR KINERJA UTAMA  
SEKRETARIAT DAERAH**

- Instansi : Sekretariat Daerah Kabupaten Rembang
- Tugas : Membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan sekretariat daerah DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, SATPOL PP, lembaga lain, kecamatan, dan kelurahan.
- Fungsi :
1. Menyusun kebijakan pemerintah daerah;
  2. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis
  3. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah;
  4. Pembinaan administrasi dan aparatur pemerintah daerah; dan
  5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama
1.	Terwujudnya Penegakan pelaksanaan Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Jumlah Perda, Perbub, Keputusan Bupati/ Instruksi Bupati yang disusun</li> <li>b. Jumlah sosialisasi Hukum di Kab. Rembang</li> <li>c. Jumlah Desiminasi Ranham</li> <li>d. Tingkat JDI Hukum di Kabupaten Rembang</li> <li>e. Jumlah Pelayanan Pengaduan Masyarakat yang ditindak lanjuti</li> </ol>
2.	Terciptanya senergitas dan harmonisasi serta kinerja penyelenggaraan pemerintah yang efisien, efektif, transparan dan akuntabel	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Jumlah laporan LKPJ Bupati dan Persentase tingkat kelancaran dalam menyusun laporan</li> <li>b. Jumlah laporan LPPD dan Persentase tingkat kelancaran dalam menyusun laporan</li> <li>c. Jumlah laporan LKPJ AMJ Bupati dan Persentase tingkat kelancaran dalam menyusun laporan</li> <li>d. Jumlah kebijakan KDH yang memberikan opini</li> <li>e. Jumlah kerjasama antar daerah</li> <li>f. Jumlah keikutsertaan dalam rapat Asosiasi</li> <li>g. Jumlah pengisian perangkat desa</li> <li>h. Jumlah desa yang difasilitasi dalam keuangan desa</li> <li>i. Jumlah desa yang dapat bantuan keuangan desa</li> <li>j. Persentase peningkatan kpasitas aparat pemedes/kades/lembaga desa tingkat kelengkapan administrasi desa. monografi desa</li> <li>k. Jumlah pengadaan buku himpunan Perda</li> <li>l. Jumlah fasilitasi Pilkades</li> <li>m. Jumlah fasilitasi partisipasi politik dalam pilkada</li> <li>n. Jumlah paket bantuan dalam rangka pileg/pilbub/pilkada</li> <li>o. Jumlah paket bantuan hibah ke KPU dan Panwas/instansi vertikal Rembang</li> <li>p. Jumlah fasilitasi bantuan pilkades tingkat kecamatan</li> <li>q. Jumlah kades dan katdes yang ikut pembekalan</li> <li>r. Jumlah kades/katdes yang mendapatkan penghargaan dan tunjangan kesejahteraan</li> <li>s. Jumlah desa yang difasilitasi dalam sosialisasi, Bintek administrasi desa, bendahara desa, pembinaan BPD dan LPMD</li> <li>t. Jumlah buku infentarisasi kewenangan kades</li> <li>u. Jumlah pembakuan nama rupa bumi</li> <li>v. Jumlah Penegasan batas daerah</li> </ol>

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama
		<ul style="list-style-type: none"> <li>w. Jumlah kecamatan/desa yang direhab/dibangun untuk pembangunan Umum</li> <li>x. Jumlah penyediaan tanah untuk yanum</li> <li>y. Jumlah peserta sosialisasi pertanahan</li> <li>z. Tersedianya data infentarisasi kepemilikan dan pemanfaatan tanah negara</li> <li>Jumlah kasus yang ditangani dalam bidang pertanahan</li> </ul>
3.	Terwujudnya efisiensi dan efektifitas pelayanan kehumasan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Jumlah dialog interaktif dan berita pembangunan daerah serta kelengkapan sarana prasarana radio</li> <li>b. Jumlah dan jenis dokumen bidang kehumasan dan pembangunan daerah</li> <li>c. Persentase sosialisasi ketentuan di bidang cukai</li> <li>d. Jumlah media cetak dan tingkat penyebaran informasi publik serta fasilitasi pers</li> </ul>
4.	Terwujudnya struktur perekonomian daerah yang stabil dan mantab	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Jumlah koordinasi dlm penyerapan aspirasi dan pengembangan bidang Ekonomi</li> <li>b. Jumlah koordinasi pengembangan ekonomi kreatif</li> <li>c. Jumlah evaluasi dan data perkembangan ekonomi daerah</li> <li>d. Jumlah identifikasi dan analisis sumberdaya alam daerah di Kabupaten Rembang</li> <li>e. Jumlah sosialisasi pengembangan kewirausahaan keluarga pekerja rokok</li> <li>f. Jumlah kegiatan promosi</li> </ul>
5.	Terwujudnya peningkatan produktifitas ekonomi daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Jumlah penyelenggaraan pasar murah</li> <li>b. Jumlah pembinaan dlm rangka peningkatan produk unggulan</li> <li>c. Jumlah penyusunan ensiklopedi batik tulis lasem dan sejenisnya</li> <li>d. Jumlah pengembangan kewirausahaan dilingkungan IHT(industri hasil tembakau dan petani tembakau)</li> <li>e. Jumlah leaflet, binner, dan eks binner dalam rangka mengenalkan produk lokal</li> <li>f. Jumlah penyelenggaraan bantuan bahan kapokmas dilingkungan pekerjaan rokok</li> <li>g. Jumlah penyertaan modal dlm BUMD</li> </ul>
6.	Terwujudnya peningkatan kesejahteraan sosial dan koordinasi di bidang investasi daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Jumlah dan persentase partisipasi pelayanan jamaah haji</li> <li>b. Jumlah dan persentase fasilitasi bantuan keagamaan dan lembaga agama</li> <li>c. Jumlah dan persentase kelancaran data bantuan</li> <li>d. Jumlah dan persentase fasilitasi bentuan sarpras pendidikan</li> <li>e. Jumlah dan persentase fasilitasi bantuan pemberdayaan perempuan</li> <li>f. Jumlah dan persentase fasilitasi bantuan PHBN</li> <li>g. Jumlah dan persentase fasilitasi bantuan sarpras olahraga</li> <li>h. Jumlah dan persentase fasilitasi bantuan sarpras seni budaya</li> <li>i. Jumlah dan persentase tingkat kesegaran jasmani melalui keg senam</li> </ul>

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama
		<ul style="list-style-type: none"> <li>j. Jumlah dan persentase kelancaran penunjang senam</li> <li>k. Jumlah dan persentase kelancaran kesehatan masyarakat</li> <li>l. Jumlah dan persentase fasilitas bantuan sarpras ormas</li> <li>m. Jumlah dan persentase efektivitas bantuan aparatur dan kesejahteraan masyarakat</li> <li>n. Jumlah dan persentase fasilitas bantuan sosial</li> <li>o. Jumlah dan persentase fasilitas penanggulangan bencana</li> </ul>
7.	Terwujudnya organisasi perangkat daerah yang efektif dan efisien dengan kebutuhan daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Jumlah standart pelayanan publik di unit pelayanan publik</li> <li>b. Persentase tingkat capaian SPM</li> <li>c. Jumlah sertifikat ISO</li> <li>d. Indeks kepuasan masyarakat</li> <li>e. Persentase pengaduan masyarakat yang di tindak lanjuti</li> <li>f. Jumlah SOP yang tersusun</li> <li>g. Jumlah SKPD yang di Evaluasi kelembagaan dan tupoksinya</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>h. Tingkat kompetensi dan profesionalisme aparatur</li> <li>i. Jumlah SKPD yg dilakukan analisis beban kerja</li> <li>j. Jumlah SKPD yang mengikuti sosialisasi Forkompanda</li> <li>k. Tingkat kelulusan uji sertifikasi</li> <li>l. Jumlah peserta sosialisasi</li> <li>m. Jumlah aparatur yang mengikuti bintek/workshop</li> <li>n. Jumlah SDM yg mengikuti diklat, diklat bintek di bidang Kehumasan</li> </ul>
8.	Mewujudkan tertib administrasi Pembangunan Daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Jumlah sosialisasi dan registrasi jasa kontruksi</li> <li>b. Terbentuknya ULPH non struktural dan terfasilitasinya layanan pengadaan secara elektronik</li> <li>c. Jumlah tayangan pengumuman pengadaan barang dan jasa melalui media masa</li> </ul>
9.	Teroptimisasinya dukungan pelaksanaan tugas pemerintahan yang efektif dan	Tingkat pemanfaatan persandian dalam komunikasi antar pemerintah Kabupaten Rembang dengan pusat dan Provinsi
10.	Terwujudnya tertib administrasi, perencanaan, pengelahan dan pelaporan keuangan Sekretariat daerah	Tingkat realisasi laporan fisik dan keuangan kegiatan semesteran dan akhir tahun

**INDIKATOR KINERJA UTAMA**  
**DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI**

- Instansi : Dinas Sosial Tengah Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Rembang
- Tugas : Melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang sosial, tenaga kerja, dan transmigrasi berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- Fungsi :
- 1 Perumusan kebijakan teknis di bidang sosial, tenaga kerja, dan transmigrasi;
  - 2 Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang sosial tenaga kerja dan transmigrasi;
  - 3 Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang sosial, tenaga kerja, dan transmigrasi;
  - 4 Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati di bidang sosial, tenaga kerja, dan transmigrasi.

<b>No</b>	<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja Utama</b>
1.	Meningkatnya kualitas hidup Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Jumlah korban bencana alam yang terlayani</li> <li>b. Jumlah korban bencana sosial yang terlayani</li> <li>c. Jumlah perlindungan anak yang mengalami masalah sosial</li> <li>d. Jumlah anak yang mendapatkan kapasitas hukum Pertimbangan Izin Pengangkatan Anak (PIPA)</li> <li>e. Jumlah proses adopsi/rekomendasi bagi adopsi anak</li> <li>f. Jumlah anak SD Tetirah ke PPA "kartini" Tawangmangu</li> <li>g. Jumlah anak yang mengikuti pentas seni anak panti</li> <li>h. Jumlah anak yang terbantu yang mendapatkan kebutuhan gizi anak panti</li> <li>i. Jumlah anak terlantar yang terlayani</li> <li>j. Jumlah anak nakal yang terlayani</li> <li>k. Jumlah PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial lainnya yang ditangani</li> <li>l. Jumlah Lanjut Usia yang tertangani</li> <li>m. Jumlah penyandang cacat yang mengikuti porseni</li> <li>n. Jumlah penyandang cacat yang ditangani</li> <li>o. Jumlah orang terlantar yang mendapatkan pelayanan</li> </ul>
2.	Pengentasan kemiskinan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Jumlah fakir miskin yang ditangani/mendapatkan stimulasi</li> <li>b. Jumlah penduduk miskin</li> <li>c. Jumlah PMKS luar panti yang terlayani</li> <li>d. Jumlah fakir miskin yang mendapatkan pembinaan dari pemerintah</li> </ul>

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama
3.	Meningkatkan aksesibilitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Jumlah Karang Taruna (KT)</li> <li>b. Jumlah Karang Taruna (KT) yang mampu menjangkau pelayanan</li> <li>c. Jumlah tumbuh kembang Karang Taruna (KT)</li> <li>d. Jumlah panti sosial swasta yang mendapatkan pembinaan pemerintah</li> <li>e. Jumlah Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)</li> <li>f. Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)</li> <li>g. Jumlah generasi muda dan masyarakat yang berperan aktif</li> <li>h. Jumlah Orsos, Ordes yang berperan aktif dalam penanganan PMKS</li> <li>i. Jumlah panti sosial pemerintah dan swasta</li> <li>j. Jumlah lembaga kesejahteraan sosial pemerintah dan swasta</li> </ul>
4.	Meningkatnya Kualitas Ketenagakerjaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Jumlah pelatihan yang dikembangkan</li> <li>b. Jumlah pencari kerja yang mendapatkan pelatihan</li> <li>c. Jumlah kejuruan yang diikuti bagi pencari kerja</li> <li>d. Jumlah pencari kerja yang tercatat</li> <li>e. Jumlah Angkatan Kerja yang memanfaatkan Kartu AK 1</li> <li>f. Jumlah Lembaga Pendidikan Ketrampilan Swasta (LPKS) di Kabupaten</li> <li>g. Jumlah Lembaga pendidikan Ketrampilan Swasta (LPKS) yang terbina</li> <li>h. Jumlah sarana dan prasarana (alat pelatihan)</li> <li>i. Jumlah penyelesaian/mediator perselisihan hubungan industrial</li> <li>j. Jumlah kasus PHI dan PHK</li> <li>k. Jumlah pengusaha dan pekerjaan yang mengikuti program jamsostek</li> <li>l. Jumlah perusahaan tertib ketentuan Undang - Undang Jamsostek</li> <li>m. Jumlah perusahaan yang menerapkan norma K3</li> <li>n. Jumlah perusahaan yang melaksanakan UMK</li> <li>o. Jumlah penanganan anak yang mengalami bentuk-bentuk pekerjaan</li> <li>p. Jumlah wajib lapor ketenagakerjaan dan perusahaan (WLKP)</li> <li>q. Jumlah KK yang berangkatkan transmigrasi</li> <li>r. Jumlah KK yang terseleksi sebagai calon transmigrasi</li> </ul>

**INDIKATOR KINERJA UTAMA  
SEKRETARIAT DPRD**

Instansi : Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang

Tugas : Menyelenggarakan Administrasi Kesekretariatan, Administrasi Keuangan, Mendukung Pelaksanaan Tugas dan fungsi DPRD, serta Mengkoordinasi dan Menyediakan tenaga Ahli yang diperlukan DPRD sesuai kemampuan keuangan daerah.

Fungsi : 1 Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;

2 Penyelenggaraan Administrasi keuangan DPRD;

3 Penyelenggaraan Rapat - rapat DPRD ;

4 Penyediaan dan Pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama
1	Terwujudnya tertib administrasi DPRD	a. Jumlah dokumen perencanaan b. Jumlah dokumen pelaporan
2.	Terwujudnya persidangan DPRD Kabupaten Rembang yang demokratif, aspiratif, transparan dan akuntabel	a. Jumlah rapat/sidang DPRD b. Jumlah bintek pendalaman tugas c. Jumlah kunjungan kerja d. Rata - rata kehadiran peserta sidang e. Jumlah tenaga ahli fraksi
3.	Terwujudnya administrasi keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang yang transparan dan akuntabel	Persentase pendanaan, pengelolaan, dan realisasi secara proporsional untuk mendukung kegiatan DPRD
4.	Peningkatan Kapasitas SDM aparatur dan Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Jumlah Bimbingan Teknis Aparatur

**INDIKATOR KINERJA UTAMA**  
**DINAS PENDIDIKAN**

- Instansi : Dinas Pendidikan Kabupaten Rembang
- Tugas : Melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang pendidikan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan
- Fungsi :
1. Perumusan kebijakan teknis bidang pendidikan;
  2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang pendidikan;
  3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang pengendalian mutu pendidikan, kurikulum, pendidik dan tenaga kependidikan dan bidang pendidikan non formal;
  4. Penyelenggaraan kesekretariatan dinas;
  5. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang pendidikan;
  6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama
1	Meningkatnya pemerataan akses, mutu dan tata kelola serta pencitraan publik pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	a. Jumlah anak usia 4-6 tahun mengikuti program TK/RA b. Jumlah TK/RA menerapkan manajemen berbasis sekolah c. Jumlah SD memiliki tenaga kependidikan non guru untuk melaksanakan tugas administrasi dan kegiatan non mengajar lainnya
2	Meningkatnya sarana dan prasarana PAUD	Jumlah TK/RA memiliki sarana dan prasarana belajar/bermain
3	Meningkatnya jumlah Lembaga PAUD	Jumlah lembaga PAUD dan TK
4	Meningkatnya pemerataan akses, mutu dan tatakelola serta pencitraan publik pada ienjang Pendidikan Dasar (Dikdas)	a. APK SD/MI b. APM SD/MI c. APK SMP/MTs d. APM SMP/MTs
5	Meningkatnya kondisi ruang kelas SD	Jumlah ruang kelas SD/MI sesuai standar
6	Meningkatnya sarana penunjang pembelajaran untuk SD dan SMP, Perpustakaan SD	a. Jumlah SD/MI memiliki Laboratorium IPA dan Komputer b. Jumlah SD/MI memiliki perpustakaan sesuai standar c. Jumlah SMP/MTs memiliki Laboratorium IPA dan Komputer d. Jumlah SMP/MTs memiliki perpustakaan sesuai standar
7	Meningkatnya partisipasi penduduk usia sekolah SD dan SMP	a. Angka Putus sekolah SD b. Jumlah lulusan SD/MI melanjutkan ke SMP/MTs c. Jumlah lulusan SMP/MTs melanjutkan ke SMA/MA/Kejuruan d. Angka Putus Sekolah SMP/MTs
8	Meningkatnya angka kelulusan UASBN dan UN	a. Angka kelulusan UASBN b. Angka kelulusan Ujian nasional SMP/MTs

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama
9	Meningkatnya pemerataan akses, mutu, relevansi dan tata kelola serta pencitraan publik pada jenjang pendidikan menengah (Dikmen)	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Jumlah lulusan SMK diterima di dunia kerja sesuai dengan keahliannya</li> <li>b. Kelulusan UN SMA/MA/SMK</li> <li>c. APM SMA/SMK/MA</li> <li>d. APK SMA/MA/SMK Angka putus sekolah</li> <li>e. Angka putus sekolah</li> </ul>
10	Meningkatnya pemerataan akses, mutu, relevansi dan tata kelola serta pencitraan publik pada jenjang pendidikan non formal (PNF)	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Tersedianya data dasar keksaraan yang diperbarui terus menerus</li> <li>b. Jumlah tutor program paket A, B dan C memiliki kualifikasi sesuai dengan standar kompetensi yang ditetapkan</li> <li>c. Jumlah lembaga kursus memiliki ijin operasional dari pemerintah daerah</li> <li>d. Jumlah lembaga kursus dan lembaga pelatihan terakreditasi</li> <li>e. Jumlah pusat kegiatan belajar masyarakat memiliki sarana dan prasarana minimal sesuai dengan standar teknis pembelajaran</li> <li>f. Tersedianya data dasar kesetaraan SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA yang diperbarui secara terus menerus</li> <li>g. Jumlah tenaga pendidik, instruktur atau penguji praktik sesuai dengan standar kompetensi yang dipersyaratkan</li> <li>h. Jumlah lembaga kursus/pelatihan /kelompok belajar usaha/ magang memiliki sarana dan prasarana minimal sesuai dengan standar teknis yang ditetapkan</li> <li>i. Tersedianya data dasar kursus/pelatihan/kelompok belajar usaha/magang yg diperbarui secara terus menerus</li> </ul>
11	Meningkatnya penduduk yang bisa membaca dan menulis	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Jumlah penduduk usia 15-44 tahun bisa membaca dan menulis</li> <li>b. Jumlah orang buta aksara dalam kelompok usia 15-44 tahun</li> </ul>
12	Meningkatnya relevansi pendidikan life skill	Jumlah lulusan program paket C dapat memasuki dunia kerja
13	Meningkatnya penduduk putus sekolah atau tidak sekolah mengikuti program paket.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Jumlah penduduk usia sekolah yang belum sekolah di SD/MI, SMP/MTS dan SMA/SMK/MA menjadi peserta didik program paket A.B dan C</li> <li>b. Jumlah penduduk putus sekolah, pengangguran dan dari keluarga pra sejahtera menjadi peserta didik dalam kursus-kursus/pelatihan /kelompok belajar usaha/magang</li> <li>c. Jumlah lulusan kursus, pelatihan, magang, kelompok belajar usaha dapat memasuki dunia kerja</li> </ul>

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama
14	Meningkatnya pemerataan akses, mutu, relevansi dan tata kelola serta pencitraan publik pada jenjang pendidikan khusus	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Jumlah guru SLB memiliki kualifikasi sesuai dengan standar kompetensi yang ditetapkan</li> <li>b. Jumlah SLB memiliki sarana dan prasarana minimal sesuai dengan standar teknis</li> <li>c. Tersedianya data dasar pendidikan khusus yang diperbarui secara terus menerus</li> <li>d. Jumlah angka kelulusan SLB</li> </ul>
15	Meningkatnya penduduk difable yang dilayani	Jumlah penduduk difable menjadi peserta didik Sekolah LB
16	Meningkatnya Guru TK/RA yang memiliki kualifikasi layak mengajar	Jumlah guru yang layak mendidik TK/RA dengan kualifikasi sesuai dengan standar kompetensi yang ditetapkan secara nasional
17	Meningkatnya guru SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA yang tersertifikasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Jumlah guru SD yang sertifikasi</li> <li>b. Jumlah guru SMP/MTs yang sertifikasi</li> <li>c. Jumlah guru SD/MI layak mengajar</li> <li>d. Jumlah guru SMA/SMK/MA yang sertifikasi</li> </ul>
18	Meningkatnya guru layak mengejar untuk jenjang pendidikan SD/MI, SMP/MTs,	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Jumlah guru SMP/MTs memiliki kualifikasi sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan</li> <li>b. Jumlah guru SMA/SMK/MA layak mengajar</li> </ul>
19	Meningkatnya tata kelola dan pencitraan publik pada penyelenggaraan pendidikan	Penerapan Sistem Manajemen Mutu (SMM) ISO 9001-2000.
20	Meningkatnya Lembaga pendidikan PAUD yang memiliki tatakelola baik	Jumlah Lembaga PAUD memiliki tatakelola dan citra yang baik
21	Meningkatnya SD/MI yang menerapkan MBS	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Jumlah SD/MI menerapkan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)</li> <li>b. Jumlah SMP/MTs menerapkan Manajemen Ber-basis Sekolah (MBS)</li> <li>c. Jumlah SMA/SMK/MA melaksanakan Program MBS dengan Baik</li> </ul>
22	Terwujudnya keadilan dan kesetaraan gender bidang pendidikan dan meningkatnya nasionalisme bidang pendidikan dan meningkatnya jiwa nasionalisme	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Jumlah sekolah yang menyelenggarakan pendidikan berperspektif gender</li> <li>b. Jumlah sekolah yang melaksanakan pembinaan Wawasan Kebangsaan</li> </ul>

**INDIKATOR KINERJA UTAMA  
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

- Instansi : Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang
- Tugas : Melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- Fungsi :
1. Perumusan Kebijakan teknis Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
  2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
  3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas Bidang Kependudukan, Pencatatan Sipil, Informasi dan Dokumentasi Kependudukan dan Pendudukan dan Pencatatan Sipil;
  4. Penyelenggaraan Kesekretariatan Dinas;
  5. Pelaksanaan Monitoring, evaluasi dan pelaporan Bidang Kependudukan dan Pencatatan sipil;
  6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama
1.	Meningkatnya kualitas kependudukan	a. Laju pertumbuhan penduduk b. Angka kelahiran total c. Angka kepadatan penduduk d. Proporsi penduduk e. Rata - rata usia kawin pertama perempuan f. Rasio penduduk yang bekerja
2.	Meningkatnya kualitas administrasi kependudukan	a. Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk b. Rasio bayi berakte kelahiran c. Rasio pasangan berakte nikah d. Cakupan jumlah Kecamatan dalam pelaksanaan SIAK f. Persentase Kecamatan yang mempunyai data tentang kependudukan di wilayahnya
3.	Meningkatnya kualitas pelayanan kependudukan	a. Persentase permohonan pembuatan dokumen akte kelahiran yang dapat diselesaikan dalam waktu yang telah ditentukan b. Persentase permohonan pembuatan akte nikah yang dapat diselesaikan dalam waktu yang telah ditentukan c. Persentase permohonan pembuatan KTP yang dapat diselesaikan dalam waktu yang telah ditentukan d. Persentase permohonan pembuatan KK yang dapat diselesaikan dalam waktu yang telah ditentukan e. Nilai survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan administrasi kependudukan
4.	Meningkatnya kualitas pelayanan pencatatan sipil	a. Angka kelahiran anak baru lahir tercatat kelahirannya b. Pendataan kepemilikan akte kelahiran seluruh masyarakat c. Prasarana dan sarana pelayanan pencatatan sipil d. Terlaksananya penertiban dokumen administrasi pencatatan sipil sebagai legalitas resmi e. Terpenuhinya tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pencatatan sipil

**INDIKATOR KINERJA UTAMA**  
**DINAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN**

- Instansi : Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Rembang.
- Tugas : Melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang pertanian dan kehutanan berdasar asas otonomi dan tugas pembantuan.
- Fungsi :
- 1 Perumusan kebijakan teknis di bidang pertanian dan kehutanan;
  - 2 Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang pertanian dan kehutanan;
  - 3 Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang tanaman pangan, perikanan budidaya, bina usaha dan pemasaran serta pengawasan dan perlindungan sumber daya pertanian dan kehutanan;
  - 4 Penyelenggaraan kesekretariatan dinas;
  - 5 Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang pertanian dan kehutanan;
  - 6 Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama
1.	Meningkatnya Pembangunan Sektor Pertanian	a. Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB b. Penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian
2.	Meningkatnya Produksi Dan Produktivitas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan	a. Jumlah Produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan b. Tingkat produktivitas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan
3.	Meningkatnya Produksi Hasil Peternakan	a. Jumlah populasi ternak b. Jumlah produksi daging c. Jumlah produksi telur
4.	Meningkatnya Kesejahteraan Petani	Nilai Tukar Petani (NTP)
5.	Meningkatnya Usaha Agribisnis	a. Jumlah pelaku usaha agribisnis pertanian b. Jumlah pelaku usaha agribis peternakan c. Jumlah pelaku usaha agribis perkebunan
6	Meningkatnya Produksi Hasil Hutan	a. Jumlah produksi hasil hutan kayu b. Jumlah produksi hasil hutan non kayu c. Jumlah pelaku usaha hasil hutan
7	Evaluasi dan pelaporan perencanaan pembangunan	a. Tingkat kerusakan hutan b. Kebakaran hutan c. Pencurian hasil hutan d. Luas lahan kritis

**INDIKATOR KINERJA UTAMA  
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN**

- Instansi : Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang
- Tugas : Melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang kelautan dan perikanan berdasarkan asas otonomi daerah
- Fungsi :
1. Perumusan kebijakan teknis bidang kelautan dan perikanan;
  2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang kelautan dan perikanan;
  3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang perikanan tangkap, perikanan budidaya, bina usaha dan pemasaran serta pengawasan dan perlindungan sumberdaya kelautan dan perikanan;
  4. Penyelenggaraan kesekretariatan dinas;
  5. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang kelautan dan perikanan;
  6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama
1.	Meningkatnya Produksi dan Produktifitas Perikanan	a. Jumlah produksi perikanan tangkap dan budidaya b. Jumlah Armada/kapal penangkap ikan c. Jumlah penerbitan SIUP dan SIPI d. Persentase Pendapatan Asli Daerah dari sektor perikanan e. Rasio penurunan penggunaan Alat Tangkap
2.	Meningkatnya Pembangunan Sektor Perikanan	a. Jumlah Investor yang menanam modal sektor perikanan b. Persentase penyerapan tenaga kerja pada sektor perikanan c. Kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB Kabupaten d. Jumlah Tingkat Konsumsi Ikan
3.	Meningkatnya Kesejahteraan Nelayan, Pembudidayaan Ikan dan Petani Garam	a. Rata - rata kepemilikan kapal b. Luas lahan garam serta lahan budidaya c. Rata - rata pendapatan perkapita nelayan d. Petani garam dan pembudidaya ikan e. Rasio nelayan yang memiliki kapal sendiri f. Rasio nelayan yang tidak memiliki kapal sendiri g. Pembudidayaan ikan yang memiliki lahan h. Petani lahan sendiri lebih dari 1 Ha
4.	Meningkatnya Kelestarian Sumberdaya Perikanan	a. Luas lahan mangrove dan bakau b. Luas terumbu karang c. Jumlah restocking ikan /udang di perairan umum d. Jumlah sarpras e. Jumlah pokmaswas
5.	Meningkatnya Akurasi Perencanaan, Informasi dan Statistik Perikanan	a. Jumlah Dokumen Statistik dan Perencanaan b. Jumlah sarpras pendukung kegiatan
6.	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia Perikanan dan Kelautan	a. Jumlah Keluarga Binaan Penyuluh b. Jumlah sarpras Penyuluh Perikanan

**INDIKATOR KINERJA UTAMA**  
**DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**

- Instansi : Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Rembang
- Tugas : Melaksanakan urusan pemerintah daerah dibidang energi dan sumber daya mineral berdasarkan asas otonomi dan tugas pemabantuan.
- Fungsi :
- 1 Perumusan kebijakan teknis bidang energi dan sumber daya mineral;
  - 2 Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang energi dan sumber daya mineral;
  - 3 Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang energi dan sumber daya mineral;
  - 4 Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati dibidang energi dan sumber daya mineral.

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama
1.	Terwujudnya pengelolaan yang profesional di bidang mineral, energi, air tanah, geologi secara berkelanjutan sesuai dengan regulasi yang berlaku	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Persentase pemetaan kawasan tambang dibandingkan dengan luas potensi bahan tambang</li> <li>b. Jumlah Pelayanan IUP ( Izin Usaha Pertambangan ) yang sudah dikeluarkan</li> <li>c. Jumlah kejadian dan korban kecelakaan tambang</li> <li>d. Rasio electifikasi</li> <li>e. Jumlah potensi titik air tanah</li> <li>f. Persentase titik air tanah yang sudah dieksplorasi dibandingkan dengan jumlah potensi titik air tanah</li> <li>g. Jumlah layanan izin pemanfaatan air tanah</li> <li>h. Jumlah kejadian bencana geologi</li> </ol>
2.	Terwujudnya peningkatan usaha masyarakat (mineral dan air tanah) yang berdampak pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Produksi mineral bukan logam dan batuan</li> <li>b. Produksi air tanah</li> <li>c. Persentase kontribusi Pendapatan Asli Daerah dari sektor mineral dan air tanah</li> </ol>
3.	Terwujudnya kelestarian Sumberdaya Alam dan lingkungan	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Jumlah luasan pasca penambangan</li> <li>b. Persentase luasan reklamasi dibanding luas lahan pasca penambangan</li> </ol>

**INDIKATOR KINERJA UTAMA**  
**DINAS KESEHATAN**

- Instansi : Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang
- Tugas : Melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang kesehatan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan
- Fungsi : Perumusan kebijakan teknis di bidang kesehatan;  
 Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kesehatan;  
 Pembinaan dan Pelaksanaan tugas di bidang kesehatan ;  
 Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati di bidang kesehatan.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama
1.	Meningkatnya status kesehatan dan gizi masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Angka Kematian Ibu (AKI)</li> <li>b. Angka Kematian Bayi (AKB)</li> <li>c. Angka Kematian Balita (AKABA)</li> <li>d. Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan</li> <li>e. Cakupan kunjungan ibu hamil (K4)</li> <li>f. Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani</li> <li>g. Ibu hamil resiko tinggi yang dirujuk</li> <li>h. Ibu hamil resiko tinggi yang ditangani</li> <li>i. Cakupan pelayanan nifas</li> <li>j. Cakupan kunjungan bayi</li> <li>k. Cakupan kunjungan neonatus</li> <li>l. Neonatus dengan komplikasi yang ditangani</li> <li>m. Cakupan pelayanan kesehatan anak balita</li> <li>n. Cakupan balita sakit ditangani dengan MTBS</li> <li>o. Cakupan balita Bawah Garis Merah (BGM)</li> <li>p. Cakupan balita yang naik berat badannya (N/D)</li> <li>q. Cakupan balita yang datang dan ditimbang (D/S)</li> <li>r. Cakupan bayi (6 - 11 bln) mendapat kapsul vitamin A 1 kali</li> <li>s. Cakupan balita (12 - 59 bln) mendapat kapsul vitamin A 2 kali</li> <li>t. Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan</li> <li>u. Cakupan Kecamatan bebas rawan gizi</li> <li>v. Cakupan ibu hamil mendapat 90 tablet Fe</li> <li>w. Cakupan ibu nifas mendapat kapsul vitamin A</li> <li>x. Cakupan bayi BBLR yang ditangani</li> <li>y. Cakupan bayi yang mendapat ASI Eksklusif</li> <li>z. Cakupan desa dengan garam beryodium baik</li> <li>Cakupan deteksi dini tumbuh kembang anak balita dan prasekolah</li> <li>Cakupan keluarga sadar gizi</li> <li>Cakupan pelayanan anak balita</li> </ul>

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama
2.	Meningkatkan kemandirian masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Cakupan Posyandu Mandiri</li> <li>b. Cakupan Posyandu Purnama</li> <li>c. Cakupan rumah tangga sehat</li> <li>d. Cakupan rumah/bangunan bebas jentik nyamuk aedes</li> <li>e. Cakupan desa siaga aktif</li> <li>f. Terbentuknya Pos Ukestren</li> <li>g. Terbinanya battra di Kabupaten Rembang</li> <li>h. Cakupan Tempat - tempat umum yang memenuhi syarat kesehatan</li> <li>i. Cakupan pelayanan kesehatan kerja pada pekerja formal</li> <li>j. Cakupan pelayanan kesehatan kerja pada pekerja informal</li> </ul>
3.	Meningkatkan akses masyarakat akan pelayanan kesehatan yang bermutu, merata dan terjangkau	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Cakupan kunjungan rawat inap</li> <li>b. Cakupan rawat jalan</li> <li>c. Ketersediaan obat sesuai kebutuhan di semua sarana pelayanan kesehatan</li> <li>d. Ketersediaan narkotika, psikotropika sesuai kebutuhan pelayanan kesehatan : prosentase ketersediaan narkotika, psikotropika sesuai kebutuhan pelayanan kesehatan</li> <li>e. Pelayanan gangguan jiwa disarana pelayanan kesehatan</li> <li>f. Pelaksanaan pembinaan sarkes swasta (BP swasta dan bidan praktik swasta</li> <li>g. Puskesmas Pelayanan Obstetri Neonatal Emergency Dasar (PONED)</li> <li>h. Sarana kesehatan dengan kemampuan pelayanan gawat darurat yang dapat diakses masyarakat</li> <li>i. Cakupan pemeriksaan kesehatan siswa TK, SLTP, SLTA dan setingkat oleh tenaga kesehatan/guru UKS/dokter kecil</li> <li>j. Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat</li> <li>k. Pemeliharaan sertifikasi ISO 9001:2008</li> <li>l. Upgrade sertifikasi ISO 9001:2008</li> </ul>
4.	Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pelayanan kesehatan dan mutu sumber daya kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Persentase Puskesmas yang melakukan kalibrasi</li> <li>b. Terpilihnya tenaga kesehatan teladan</li> <li>c. Persentase profesi tenaga kesehatan yang memiliki standar kompetensi</li> <li>d. Rasio Ahli Kesehatan Masyarakat per 100.000 penduduk</li> <li>e. Rasio Apoteker per 100.000 penduduk</li> <li>f. Rasio Asisten Apoteker per 100.000 penduduk</li> <li>g. Rasio Bidan per 100.000 penduduk</li> <li>h. Rasio Dokter Gigi per 100.000 penduduk</li> <li>i. Rasio Dokter per 100.000 penduduk</li> <li>j. Rasio Dokter Spesialis per 100.000 penduduk</li> <li>k. Rasio Nutrisionis per 100.000 penduduk</li> <li>l. Rasio Perawat per 100.000 penduduk</li> <li>m. Rasio Sanitarian per 100.000 penduduk</li> <li>n. Rasio analis kesehatan per 100.000 penduduk</li> </ul>

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama
5.	Menurunnya angka kesakitan dan angka kematian penyakit serta mencegah meluasnya Kejadian Luar Biasa (KLB) dan bencana	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)</li> <li>b. Angka Kesakitan / Incident Rate (IR) Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD)</li> <li>c. Angka Kematian / Case Fatality Rate (CFR) Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD)</li> <li>d. Persentase penderita Demam Berdarah Dengue (DBD) ditangani</li> <li>e. Angka Kesembuhan penderita TBC BTA positif (CR/Cure Rate)</li> <li>f. Penemuan kasus TBC BTA positif (CDR/Case Detection Rate)</li> <li>g. Acute Flaced Paralysis (AFP) rate per 100.000 penduduk &lt; 15 tahun</li> <li>h. Angka Kesakitan / Incident Rate (IR) Diare</li> <li>i. Angka Kematian / Case fatality rate (CFR) Diare</li> <li>j. Balita dengan Diare yang ditangani</li> <li>k. Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi &lt; 24 jam</li> <li>l. Penderita Kusta yang selesai berobat (RFT) rate</li> <li>m. Klien yang mendapatkan penanganan HIV/AIDS</li> <li>n. Cakupan kasus IMS yang ditangani</li> <li>o. Donor darah di screening terhadap HIV/AIDS</li> <li>p. Cakupan balita dengan Pneumonia yang ditangani</li> <li>q. Annual Parasite Indect (API) pada Malaria per 1.000 penduduk</li> <li>r. Penderita Malaria yang diobati</li> </ul>
	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang sehat	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Cakupan Rumah Sehat</li> <li>b. Cakupan Tempat - tempat umum yang memenuhi syarat kesehatan</li> <li>c. Institusi yang dibina</li> <li>d. Penduduk yang memanfaatkan jamban sehat</li> <li>e. Rumah yang mempunyai SPAL</li> <li>f. Persentase penduduk yang memiliki akses terhadap air bersih yang berkualitas</li> </ul>
7.	Meningkatnya cakupan jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat khususnya miskin dan rentan melalui Jamkesmas dan Jamkesda	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Cakupan penduduk yang menjadi peserta jaminan pemeliharaan kesehatan pra bayar</li> <li>b. Cakupan jaminan pemeliharaan kesehatan keluarga miskin dan masyarakat rentan</li> <li>c. Cakupan pelayanan kesehatan dasar keluarga miskin</li> <li>d. Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien keluarga miskin</li> </ul>

**INDIKATOR KINERJA UTAMA**  
**DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

- Instansi : Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang
- Tugas : Melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- Fungsi :
- 1 Perumusan kebijakan teknis di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika;
  - 2 Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika;
  - 3 Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika;
  - 4 Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika.

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama
1.	Terwujudnya kapasitas pelayanan jasa perhubungan, komunikasi dan informatika yang maksimal	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Jumlah sarana pengujian kendaraan bermotor yang dibangun</li> <li>b. Jumlah tenaga penguji kendaraan bermotor</li> <li>c. Jumlah kendaraan angkutan umum yang memiliki ijin</li> <li>d. Jumlah kapal yang memiliki ijin</li> <li>e. Jumlah kendaraan yang diuji</li> <li>f. Jumlah website milik Pemerintah Daerah yang dapat diakses oleh masyarakat melalui internet</li> <li>g. Jumlah Pendapatan Asli Daerah dari usaha dibidang perhubungan, komunikasi dan informatika</li> </ol>
2.	Terwujudnya situasi lalu lintas jalan yang tertib, aman, selamat dan lancar	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Jumlah pengadaan rambu - rambu lalu lintas</li> <li>b. Jumlah pelanggaran tarif pada masa angkutan lebaran</li> <li>c. Jumlah kendaraan yang melakukan pelanggaran rambu-rambu lalu lintas</li> <li>d. Jumlah angka kecelakaan lalu - lintas yg menyebabkan kematian atau luka parah</li> <li>e. Jumlah kendaraan angkutan umum yang melakukan pelanggaran ketentuan trayek</li> </ol>
3.	Terwujudnya pengawasan, pengendalian, keamanan dan ketertiban pelayaran	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Jumlah menara suar yang dibangun</li> <li>b. Jumlah pelanggaran dokumen kapal</li> <li>c. Jumlah kecelakaan di laut</li> </ol>
4.	Terwujudnya pengembangan komunikasi dan informatika	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Jumlah wartel, warnet, radio dan BTS yang memiliki ijin.</li> <li>b. Luas jangkauan pemancar radio</li> <li>c. Jumlah pelanggaran penggunaan frekuensi radio</li> <li>d. Jumlah pemegang ijin usaha penyiaran</li> </ol>

**INDIKATOR KINERJA UTAMA**  
**DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA**

- Instansi : Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rembang
- Tugas : Melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olahraga berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan
- Fungsi :
- 1 Perumusan kebijakan teknis di bidang kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olahraga;
  - 2 Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olahraga;
  - 3 Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olahraga;
  - 4 Penyelenggaraan kesekretariatan dinas;
  - 5 Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olahraga; dan
  - 6 Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama
1.	Meningkatkan kelestarian kebudayaan daerah	a. Persentase peninggalan Jarahmuskala yang dilestarikan b. Jumlah Sumber Daya Manusia (ahli sejarah/pembina, pengelola, dan juru pelihara) Jarahmuskala yang aktif dan terbina c. Naskah kajian Jarahmuskala d. Jumlah NBSF (Nilai, Budaya, Seni, dan Film) e. Jumlah kegiatan/event kebudayaan f. Jumlah prestasi/penghargaan kegiatan/event
2.	Meningkatnya daya tarik wisata dengan budaya "sapta pesona pariwisata"	a. Jumlah obyek/atraksi pariwisata b. Jumlah usaha/jasa pariwisata c. Jumlah Sumber Daya Manusia pariwisata yang aktif dan terbina d. Jumlah kegiatan/event/promosi dan pemasaran pariwisata e. Jumlah prestasi/penghargaan kegiatan/event pariwisata f. Jumlah kunjungan wisata g. Rata-rata lama tinggal wisatawan h. Persentase Pendapatan Asli Daerah sektor pariwisata
3.	Meningkatnya peran serta pemuda dalam pembangunan karakter bangsa	a. Jumlah organisasi dan potensi kepemudaan yang terregistrasi b. Jumlah Sumber Daya Manusia kepemudaan yang aktif dan terbina c. Jumlah kegiatan/event kepemudaan d. Tingkat prestasi/penghargaan kegiatan
4.	Terjadinya peningkatan kesehatan, kebugaran dan prestasi olahraga	a. Jumlah organisasi/klub cabang olahraga yang terregistrasi b. Jumlah atlet/olahragawan yang aktif dan terbina c. Jumlah kegiatan/event keolahragaan

**INDIKATOR KINERJA UTAMA**  
**DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN UMKM**

- Instansi : Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Rembang
- Tugas : Melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan
- Fungsi :
1. Perumusan kebijakan teknis di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah;
  2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah;
  3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah;
  4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah.

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama
1.	Meningkatnya kapasitas dan kualitas usaha mikro kecil dan menengah	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Jumlah usaha mikro kecil dan menengah</li> <li>b. Persentase peningkatan jumlah usaha mikro kecil dan menengah</li> <li>c. Persentase usaha mikro kecil dan menengah dibandingkan seluruh unit usaha</li> <li>d. Persentase penyerapan tenaga kerja di sektor usaha mikro kecil dan menengah dibanding jumlah penduduk</li> <li>e. Jumlah omzet usaha mikro kecil dan menengah</li> <li>f. Jumlah pelaku usaha mikro kecil dan menengah yang mengikuti pembinaan atau pelatihan usaha</li> <li>g. Jumlah usaha mikro kecil dan menengah yang terfasilitasi dalam kegiatan promosi perdagangan di luar daerah</li> </ol>
2.	Meningkatnya kualitas sektor usaha perdagangan dan perlindungan konsumen	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Jumlah usaha perdagangan di Kabupaten Rembang</li> <li>b. Jumlah pedagang pasar</li> <li>c. Persentase jumlah kios pasar dibandingkan jumlah pedagang pasar</li> <li>d. Persentase jumlah los pasar dibandingkan jumlah pedagang pasar</li> <li>e. Jumlah aduan layanan di 12 pasar daerah yang teratas</li> <li>f. Persentase kecamatan yang memiliki pasar</li> <li>g. persentase kecamatan yang pasar daerah</li> <li>h. Jumlah ekspor Kabupaten Rembang</li> <li>i. Frekuensi operasi pasar dan pengawasan peredaran barang/jasa</li> <li>j. Jumlah fasilitasi penyelesaian sengketa perlindungan terhadap konsumen</li> <li>k. Jumlah pedagang yang dibina</li> <li>l. Jumlah sosialisasi informasi perdagangan</li> <li>m. Jumlah hari penerbitan rekomendasi izin usaha perdagangan</li> </ol>

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama
3.	Mendorong penciptaan produk industri yang mengintegrasikan antara sumber daya lokal dan permintaan pasar	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Jumlah usaha industri</li> <li>b. persentase pertumbuhan jumlah usaha industri</li> <li>c. persentase jumlah usaha industri kecil dibandingkan jumlah seluruh industri</li> <li>d. Jumlah kapasitas produksi</li> <li>e. Jumlah volume produksi</li> <li>f. persentase volume produksi dibandingkan kapasitas produksi</li> <li>g. Jumlah pelaku usaha industri yang dibina atau dilatih</li> <li>h. Jumlah sentra industri</li> <li>i. Jumlah klaster industri</li> <li>j. Jumlah fasilitasi pengurusan HAKI produk industri</li> <li>k. Jumlah hari penerbitan rekomendasi izin usaha industri</li> </ul>
4.	Meningkatnya kualitas koperasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Jumlah koperasi</li> <li>b. persentase pertumbuhan jumlah koperasi</li> <li>c. persentase pertumbuhan jumlah anggota koperasi</li> <li>d. persentase jumlah koperasi aktif dibandingkan dengan jumlah seluruh koperasi</li> <li>e. persentase jumlah koperasi sehat dibandingkan dengan jumlah seluruh koperasi</li> <li>f. persentase jumlah koperasi berklasifikasi A dibandingkan dengan jumlah seluruh koperasi</li> <li>g. Jumlah koperasi yang dibina</li> </ul>
5.	Meningkatnya jumlah kemitraan usaha	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Jumlah temu usaha</li> <li>b. Jumlah perjanjian kemitraan/kerjasama</li> <li>c. Jumlah penyaluran modal kepada koperasi dan UMKM melalui temu usaha</li> </ul>
6.	Tercapainya peningkatan pendapatan retribusi	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Jumlah pendapatan daerah dari retribusi sarana perdagangan</li> <li>b. Jumlah bintek pengelolaan pasar</li> <li>c. Jumlah pembangunan sarana perdagangan</li> </ul>

**INDIKATOR KINERJA UTAMA  
DINAS PEKERJAAN UMUM**

Instansi : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Rembang

Tugas : Melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang pekerjaan umum, perumahan dan tata ruang.

Fungsi : 1. Perumusan kebijakan teknis dibidang pekerjaan umum, perumahan tata ruang;  
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pekerjaan umum;  
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pekerjaan umum, perumahan dan tata ruang.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama
1.	Meningkatkan kualitas jalan dan jembatan	a. Meningkatkan prosentase panjang jalan dalam kondisi baik b. Meningkatkan unit jembatan dalam kondisi baik c. Tersusunnya data base jaringan jalan dan jembatan secara keseluruhan
2.	Tersedianya prasarana dan sarana perumahan/pemukiman	a. Presentasi realisasi bantuan peningkatan bantuan peningkatan kualitas permukiman b. Peningkatan sarana dan prasarana lingkungan permukiman yang layak c. Persentase terlengkapnya prasarana dan sarana dasar lingkungan permukiman yang memadai pada kawasan permukiman d. Tercapainya pembangunan rumah sederhana sehat bersubsidi dari pemerintah daerah 25% dari kegiatan/program e. Persentase penurunan jumlah rumah tidak/kurang layak huni f. Meningkatnya lingkungan permukiman yang layak bagi masyarakat sebanyak 12\$ g. Tersusunnya Peraturan Tentang Bangunan dan Gedung Kabupaten Rembang h. Persentase bangunan gedung dan lingkungan tertata dengan baik i. Tersusunnya Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran (RISPK) Kabupaten Rembang
3.	Tersedianya Prasarana dan sasaran air bersih	Peningkatan Jumlah penduduk yang dilayani air bersih
4.	Tersedianya Prasarana dan sasaran air baku	a. Tersusunnya Masterplan Pengelolaan Sumber Daya Air b. Persentase peningkatan sawah dengan Air baku/teknis c. Persentase meningkatnya Air baku/bersih
5.	Meningkatnya kuantitas dan kualitas ruang perkotaan	a. Terpenuhinya 20% RTH publik perkotaan b. Tersusunnya dokumen penataan ruang secara lengkap
6.	Meningkatnya volume sampah terangkut	Persentase peningkatan sampah terangkut

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama
7.	Meningkatnya kesadaran penduduk dalam pengolahan sampah	Persentase penduduk melaksanakan konsep 3R
8.	Terlampirnya trotoar	Persentase panjang trotoar yang baik
9.	Meningkatnya sarana prasarana serta mobilitas tim pemadam kebakaran	Persentase pengurangan kerugian material akibat kebakaran
10.	Terpeliharanya saluran drainasi dan gorong - gorong	Persentase panjang saluran drainase dan gorong - gorong yang baik

**INDIKATOR KINERJA UTAMA**  
**DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**

- Instansi : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rembang
- Tugas : Melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah berdasarkan atas otonomi dan tugas pembantuan serta selaku Bendahara Umum Daerah
- Fungsi :
1. Perumusan Kebijakan teknis bidang pendapatan, pengolahan keuangan dan aset daerah;
  2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang pendapatan pengolahan keuangan dan aset daerah;
  3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang pendapatan, anggaran, perbendaharaan, aset dan akuntansi;
  4. Penyelenggaraan kesekertariatan dinas;
  5. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang pendapatan, pengolahan keuangan dan aset daerah;
  6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama
1.	Peningkatan Pendapatan Daerah	a. Jumlah PAD b. Jumlah Penerimaan Pajak c. Jumlah Penerimaan Retribusi Daerah d. Jumlah DAK e. Jumlah DAU f. Jumlah Dana Perimbangan g. Jumlah Perda dan Peraturan Bupati tentang Pajak/retribusi daerah h. Persentase Intensifikasi dan ekstensifikasi Sumber - sumber Pendapatan Asli Daerah i. Persentase Penyelesaian Piutang Pajak/Retribusi daerah j. Peningkatan Penagihan Pajak/Retribusi
2.	Terwujudnya Pengelolaan Keuangan yang akuntabel	a. Ketepatan penyusunan dokumen Laporan b. Tingkat ketepatan waktu penetapan Raperda APBD c. Tingkat ketepatan Raperda pertanggungjawaban APBD d. Tingkat pemahaman Sistem Informasi Keuangan Daerah e. Persentase Sisdur Pengelolaan Keuangan Daerah f. Ketepatan penerbitan dan verifikasi SPD dan Anggaran Kas g. Tingkat kesamaan Kodekifikasi penganggaran, pendapatan dan belanja h. Jumlah pembinaan pengelolaan keuangan daerah i. Kompilasi dan Validasi RKA, DPA, DPPA, DPA-L

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama
3.	Terwujudnya ketepatan Pengelolaan Aset daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Ketepatan standarisasi indeks biaya/kegiatan Pemda</li> <li>b. Persentase rencana kebutuhan dan pemeliharaan barang</li> <li>c. Persentase pengadaan, penyaluran dan penyimpanan barang daerah</li> <li>d. Jumlah pensertifikatan tanah pemda</li> <li>e. Persentase penghapusan barang daerah melalui mekanisme lelang</li> <li>f. Persentase fasilitas pengelolaan barang</li> <li>g. Persentase Investasi dan sensus barang</li> <li>h. Persentase tertib pengelolaan barang daerah</li> <li>i. Tingkat managemen aset</li> </ul>

**INDIKATOR KINERJA UTAMA**  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

- Instansi : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Rembang
- Tugas : Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang perencanaan pembangunan, statistik, penelitian dan pengembangan.
- Fungsi :
- 1 Perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan, statistik, penelitian dan pengembangan;
  - 2 Pengordinasian penyusunan perencanaan pembangunan ;
  - 3 Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perencanaan pembangunan, statistik, penelitian dan pengembangan;
  - 4 Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan, statistik, penelitian dan pengembangan; dan
  - 5 Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati di bidang perencanaan pembangunan, statistik, penelitian dan pengembangan.

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama
1.	Terselenggaranya proses penyusunan perencanaan pembangunan secara oertahap, berjenjang dan berkelanjutan dengan melibatkan seluruh stakeholders	a. Musrenbang RPJPD, RPJMD dan RKPD mulai dari tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten, Provinsi, Nasional b. Forum SKPD
2.	Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas dan berkelanjutan	a. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) b. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) c. Dokumen RTRW d. Rencana Kinerja Pemerintah Daerah (RKPD) e. Perencanaan Kinerja f. Kesesuaian muatan dokumen perencanaan pembangunan antar tingkat pemerintahan
3.	Terselenggaranya pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan untuk mendukung kegiatan pembangunan secara optimal	Jumlah Dokumen Kajian Penelitian dan Pengembangan
4.	Tersedianya data dan informasi pembangunan yang akurat dan berkualitas	a. Dokumen Sistem Informasi Profil Daerah (SIPD) b. Rembang Dalam Angka (RDA): c. Kecamatan Dalam Angka (KCA) d. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) e. Indeks Sosial Ekonomi (ISE) f. PDRB Kabupaten g. PDRB Kecamatan h. Indeks Kemiskinan i. Indeks Gini j. Indeks Harga Konsumen (IHK)

5.	Terlaksananya Monitoring dan Pengendalian perencanaan pembangunan	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan pembangunan per triwulan
6.	Terlaksananya pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah	<p>a. Laporan pengendalian dan evaluasi kebijakan pembangunan daerah (RPJMD,RKPD,Renstra SKPD,Renja SKPD)</p> <p>b. Laporan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah (RPJPD,RPJMD,Renstra SKPD,Renja SKPD,RKPD)</p> <p>c. Laporan evaluasi hasil rencana pembangunan daerah (RPJPD,RPJMD,RKPD,Renstra SKPD,Renja SKPD)</p> <p>d. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)</p>

**INDIKATOR KINERJA UTAMA  
INSPEKTORAT**

Instansi : Inspektorat Kabupaten Rembang

Tugas : Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan Pemerintah Daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan Pemerintah Desa dan pelaksanaan pemerintah desa

Fungsi : 1. Perencanaan program pengawasan;  
 2. Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan bidang pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan;  
 3. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan;  
 4. Evaluasi dan pelaporan bidang pengawasan;  
 5. Pelaksanaan kesekretariatan inspektorat;  
 6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama
1.	Meningkatnya efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Persentase jumlah pemeriksaan reguler terhadap jumlah obyek pemeriksaan sesuai PKPT (Program Kerja Pengawasan Tahunan) dan target LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) dalam kerangka penyelenggaraan Pemda</li> <li>b. Persentase jumlah Lapran hasil Pemeriksaan (LPH) non reguler terhadap keseluruhan pemeriksaan non reguler</li> <li>c. Persentase evaluasi dan tindak lanjut hasil pemeriksaan terhadap pemeriksaan reguler dan non reguler</li> <li>d. Persentase hasil pemeriksaan APFP (Aparat Pemerintah Fungsional Pengawas) lain yang telah ditindak lanjuti terhadap keseluruhan jumlah pemeriksaan APFP lain terlapor</li> <li>e. Persentase evaluasi kebenaran penyajian laporan akuntabilitas keuangan dan kinerja Pemerintah daerah</li> </ul>
2.	Meningkatnya Sumber Daya Manusia aparatur pengawasan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Persentase aparatur pengawasan yang telah mengikuti Diklat Sertifikasi Auditor terhadap jumlah aparatur pengawasan dan keseluruhan obyek pemeriksaan</li> <li>b. Persentase aparatur pengawasan yang telah mengikuti Diklat/Sosialisasi/Bintek/Pelatihan/Kursus/Seminar pendukung program pengawasan</li> <li>c. Persentase aparatur pengawasan yang telah memenuhi angka kredit JFA (Jabatan Fungsional Auditor)</li> </ul>

**INDIKATOR KINERJA UTAMA  
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN**

- Instansi : Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Rembang
- Tugas : Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan
- Fungsi :
- 1 Perumusan kebijakan teknis di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
  - 2 Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
  - 3 Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
  - 4 Penyelenggaraan kesekretariatan badan;
  - 5 Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan; dan
  - 6 Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai tugas dan fungsinya.

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama
1.	Meningkatnya kualitas kedisiplinan, netralisasi dan kesejahteraan PNS yang didukung reward and punishment	a. Menurunnya angka pelanggaran disiplin PNS b. Meningkatnya pemberian penghargaan kepada PNS c. Persentase penyelesaian kasus PNS
2.	Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia melalui peningkatan profesionalitas, kompetensi dan moralitas PNS	a. Jumlah PNS yang melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi b. Jumlah PNS yang lulus diklat struktural, diklat fungsional, dan bintek
3.	Meningkatnya kualitas perencanaan dan pengembangan PNS yang transparan, terukur dan akuntabel didukung pola karier	a. Persentase penetapan pegawai yang sesuai dengan latar belakang pendidikan b. Proses jabatan fungsional dan struktural yang terisi
4.	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kepegawaian	a. Persentase pelayanan penertiban Karis, Karsu, Kapeg, dan kartu Taspen b. Persentase pelayanan penertiban SK Pensiunan PNS c. Persentase pelayanan Penertiban SK KP dan Gaji Berkala PNS d. Persentase pelayanan Surat Ijin Belajar, Tugas Belajar dan Penggunaan Gelar bagi PNS e. Terpenuhinya permintaan data kepegawaian yang up to date

**INDIKATOR KINERJA UTAMA**  
**BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA**

- Instansi** : Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten
- Tugas** : Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana
- Fungsi** :
- 1 Perumusan kebijakan teknis di biang pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana;
  - 2 Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana;
  - 3 Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana dan;
  - 4 Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati dibidang pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana.

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama
1	Meningkatnya Cakupan Lembaga Sosial Organisasi Masyarakat Perdesaan dalam kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Jumlah tenaga/kader pemberdayaan masyarakat yang mengikuti pelatihan LSOM</li> <li>b. Jumlah desa/kelurahan yang terpilih dalam kegiatan evaluasi Pemberdayaan Masyarakat</li> <li>c. Jumlah desa/kelurahan yang telah menyusun dokumen perencanaan (RPTDes dan RPJMDes)</li> <li>d. Jumlah desa yang telah menyusun dan mengekspose hasil pendataan keluarga</li> <li>e. Persentase kecamatan yang termonitor dan terevaluasi pengelolaan lembaga ekonomi masyarakat</li> </ol>
2	Meningkatnya Cakupan wilayah kegiatan peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Jumlah Pokja P2MBG yang terbentuk</li> <li>b. Jumlah Dokumen Profil Tribina (BKB, BKR dan BKL) yang tersusun</li> <li>c. Jumlah Tribina Unggulan yang terpilih</li> <li>d. Jumlah kelas Ibu hamil yang terbentuk</li> <li>e. Persentase data AKI dan AKB (Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi) yang terinventarisir</li> <li>f. Jumlah kader yang dibina dalam kegiatan PUG</li> <li>g. Jumlah kader yang terlatih dalam kegiatan PUG</li> <li>h. Jumlah kelompok UEP yang yang dikelola oleh perempuan</li> <li>i. Jumlah kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) yang dilatih pengelolaan administrasi kelompok</li> </ol>
3	Meningkatnya Cakupan penerapan PNPM Mandiri Perdesaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Jumlah kecamatan yang didampingi dalam pengelolaan PNPM MD</li> </ol>
4	Meningkatnya jumlah fasilitasi Perlindungan Perempuan dan Anak terhadap berbagai tindak kekerasan	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Jumlah kader yang disosialisasi dalam penanganan pra dan pasca korban tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak</li> <li>b. Persentase pelayanan terhadap korban kekerasan perempuan dan anak yang melapor pada unit pengaduan yang dilakukan oleh petugas terlatih pada unit pelayanan terpadu</li> <li>c. Persentase pelayanan terhadap kesehatan korban kekerasan perempuan dan anak oleh tenaga kesehatan terlatih di Rumah Sakit</li> </ol>

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama
		<p>d. Persentase fasilitasi pelayanan pemulangan bagi korban kekerasan bagi perempuan dan anak oleh petugas/relawan yang terlatih di unit pelayanan terpadu</p> <p>d. Persentase layanan bimbingan rohani korban kekerasan bagi perempuan dan anak</p> <p>e. Persentase fasilitasi kepada korban kekerasan bagi perempuan dan anak dalam proses penegakan dan bantuan hukum</p>
5	Meningkatnya cakupan wilayah kegiatan pengembangan masyarakat perdesaan	<p>a. Jumlah Lokasi desa TMMD</p> <p>b. Jumlah desa lokasi pencanangan kegiatan BBGRM</p> <p>c. Jumlah desa yang dapat menyusun dokumen profil desa/kelurahan</p> <p>d. Jumlah kelompok masyarakat pesisir yang terbentuk di kecamatan</p>
6	Meningkatnya cakupan lembaga yang melaksanakan kegiatan responsif gender dan perlindungan anak	<p>a. Jumlah dokumen parahita yang tersusun</p> <p>b. Jumlah posyandu unggulan yang terbentuk</p> <p>c. Jumlah kader posyandu yang terlatih</p> <p>d. Jumlah data posyandu yang tersusun</p> <p>e. Jumlah sarana posyandu yang tersedia</p> <p>f. Jumlah rapat kordinasi pokjanal posyandu tingkat</p> <p>g. Jumlah orang tua yang mendapatkan pelatihan tentang metode pengajaran bagi anak yang berkebutuhan khusus</p> <p>h. Jumlah paket kegiatan yang dilaksanakan dalam pesta ceria anak dan penjaringan kreatifitas anak serta fasilitasi bantuan kesejahteraan anak dengan kecacatan</p> <p>i. Jumlah dokumen statistik gender yang tersusun</p> <p>j. Jumlah sosialisasi Perbup pemberdayaan lembaga berbasis gender dan Program responsif gender</p> <p>k. Jumlah paket kegiatan penyelenggaraan nikah masal</p> <p>l. Jumlah vokal point yang terbentuk di tiap SKPD</p>
7	Meningkatnya cakupan wilayah yang memperoleh fasilitasi ekonomi masyarakat perdesaan	<p>a. Jumlah kelompok yang mendapat fasilitasi permodalan bagi usaha mikro kecil dan menengah</p> <p>b. Jumlah kecamatan yang terdata sarana dan prasarana ekonomi perdesaan</p> <p>c. Jumlah BUMDes yang terbentuk</p>
8	Meningkatnya cakupan wilayah pemasarakatan dan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	<p>a. Jumlah fasilitasi pelatihan pengolahan produk lokal daerah melalui TTG</p> <p>b. Jumlah pioner pencipta TTG yang terbentuk</p> <p>c. Jumlah kelompok industri kecil di kecamatan yang mendapat bantuan peralatan TTG</p> <p>d. Jumlah Posyantek percontohan tingkat nasional dan Posyantek percontohan tingkat Kabupaten yang terbentuk</p>
9	Meningkatnya cakupan wilayah pembentukan kelompok Bina Lingkungan Keluarga Sejahtera (BLKS)	Jumlah desa unggulan yang dibina dengan kegiatan BLKS

**INDIKATOR KINERJA UTAMA  
BADAN KETAHANAN PANGAN DAN P4K**

- Instansi : Badan Ketahanan Pangan dan P4K Kabupaten Rembang
- Tugas : Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang ketahanan pangan dan pelaksana penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan
- Fungsi
- 1 Perumusan kebijakan teknis di bidang ketahanan pangan dan pelaksana penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan;
  - 2 Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang ketahanan pangan dan pelaksana penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan;
  - 3 Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang ketahanan pangan dan pelaksana penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan;
  - 4 Penyelenggaraan kesekretariatan badan;
  - 5 Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang ketahanan pangan dan pelaksana penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan;
  - 6 Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai tugas dan fungsinya.

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama
1.	Meningkatnya Ketahanan Pangan	<ol style="list-style-type: none"><li>a. Nilai ketergantungan konsumsi pada beras</li><li>b. Tingkat pemenuhan produksi beras terhadap kebutuhan beras lokal</li><li>c. Rasio pemenuhan kebutuhan pangan</li><li>d. Persentase desa yang telah memenuhi tahan pangan</li></ol>
2.	Meningkatnya kualitas penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan	<ol style="list-style-type: none"><li>a. Persentase peningkatan kelas penyuluhan</li><li>b. Jumlah diklat formal/non formal yang diikuti penyuluhan</li></ol>
3.	Berkembangnya kelembagaan petani	<ol style="list-style-type: none"><li>a. Jumlah kelompok tani</li><li>b. Jumlah gapoktan</li><li>c. Persentase peningkatan kelas kelompok tani</li></ol>

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama
10	Meningkatnya prosentase kesertaan ber KB dan Tahapan Keluarga Sejahtera	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Cakupan PUS yang isterinya dibawah usia 20 tahun</li> <li>b. Cakupan sasaran Pasangan Usia Subur menjadi peserta KB Aktif</li> <li>c. Cakupan Pasangan Usia Subur yang ingin ber KB tidak terpenuhi (Unmet Need)</li> <li>d. Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB</li> <li>e. Cakupan PUS Peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber KB</li> <li>f. Ratio Pembantu Pembina Keluarga Berencana (PPKBD) 1 (satu) petugas di setiap Desa/Kelurahan</li> <li>g. Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga disetiap desa/kelurahan setiap tahun</li> <li>h. Prosentase fasilitasi pelayanan melalui PIK-Remaja di berbagai media komunikasi</li> <li>i. Jumlah PIK Remaja Tegar, Tegak dan Tumbuh yang ditingkatkan kualitas dan kuantitas pengelolaannya</li> </ul>
11	Meningkatnya cakupan wilayah yang mendapatkan fasilitas penataan lingkungan dan pemukiman perdesaan	Jumlah desa/kelurahan yang mendapat fasilitasi pembangunan sarana prasarana lingkungan permukiman perdesaan
12.	Meningkatnya sarana dan prasarana pendukung pelayanan	Cakupan penyediaan alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat setiap tahun
13	Meningkatnya capaian program Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana	Jumlah dokumen Rencana Kerja program Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di tingkat Kabupaten dan kecamatan

**INDIKATOR KINERJA UTAMA**  
**KANTOR KESATUAN BANGSA POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT**

- Instansi : Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Rembang
- Tugas : Melaksanakan tugas pemerintah di bidang pembinaan Kesatuan Bangsa dan Ketahanan Bangsa serta Perlindungan Masyarakat
- Fungsi :
1. Perumusan Kebijakan teknis di bidang Pembinaan Kesatuan dan Ketahanan Bangsa serta Perlindungan Masyarakat;
  2. Pelaksanaan pembinaan teknis dibidang Kesatuan dan Ketahanan Bangsa serta Perlindungan Masyarakat;
  3. Pembinaan terhadap unit pelaksanaan teknis Kantor Kesbangpol dan Linmas;
  4. Pelaksanaan urusan Ketatausahaan Kantor Kesbangpol dan Linmas.

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama
1.	Terwujudnya masyarakat yang demokratis melalui peningkatan peran partai politik, lembaga perwakilan rakyat dan partisipasi politik masyarakat yang tinggi dalam pemerintahan dan pembangunan	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Jumlah parpol yang mengikuti Pemilu (Pileg, Pilpres, dan Pilkada)</li> <li>b. Jumlah parpol yang terverifikasi</li> <li>c. Jumlah parpol yang terwakili di lembaga perwakilan rakyat</li> <li>d. Jumlah masyarakat yang menggunakan hak pilih</li> <li>e. Jumlah produk UU, Perpu dan Perda</li> <li>f. Jumlah aspirasi masyarakat yang diserap dan terealisasi</li> <li>g. Jumlah Parpol yang melaporkan penggunaan bantuan parpol</li> <li>h. Terlaksananya pergantian antar waktu bagi anggota DPRD</li> </ol>
2.	Terwujudnya Pengembangan dan pembangunan jati diri bangsa untuk mewujudkan karakter dan identitas bangsa yang terbuka dan berakar pada aktualisasi nilai-nilai budaya setempat	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Jumlah toma, etnis yang terbina</li> <li>b. Jumlah kegiatan forum komunikasi terhadap (ormas, LSM, Tomas, Toga)</li> <li>c. Jumlah generasi muda, pelajar yang mengikuti temu muka generasi muda dengan pejuang 1945</li> <li>d. Jumlah ormas yang mengikuti dialog peran dan fungsi ormas</li> <li>e. Jumlah pembinaan ketahanan bangsa terhadap (seniman, pemuda dan pelajar)</li> <li>f. Jumlah LSM, Ormas yang melapor</li> </ol>
3.	Terwujudnya peningkatan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat untuk mewujudkan suasana kondusif bagi pelaksanaan pembangunan	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Jumlah personil PAM terkait</li> <li>b. Jumlah ijin penelitian/survei yang terlayani</li> <li>c. Jumlah orang asing yang terdata dan diawasi</li> <li>d. Jumlah dan 9 jenis pokok yang terawasi</li> <li>e. Jumlah personil komindo yang bertugas mewujudkan keadaan aman dan kondusif</li> <li>f. Jumlah anggota Linmas yang terlatih (mengikuti pelatihan/diklat)</li> <li>g. Jumlah anggota linmas yang mendapat pembinaan</li> <li>h. Jumlah anggota Linmas yang mengikuti HUT Linmas dan tmmd sengkuyung</li> <li>i. Jumlah bantuan sarana prasarana pos kamling yang tersalurkan</li> <li>j. Jumlah kejadian bencana yang tertangani</li> <li>k. Jumlah personil yang mengikuti sosialisasi prosedur tetap bencana</li> </ol>

**INDIKATOR KINERJA UTAMA**  
**KANTOR LINGKUNGAN HIDUP**

- Instansi : Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang
- Tugas : Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang lingkungan hidup.
- Fungsi : 1 Perumusan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup;  
 2 Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang lingkungan hidup;  
 3 Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang lingkungan hidup;  
 4 Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati di bidang lingkungan hidup.

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama
1.	Terkendalinya Pencemaran Dan Kerusakan	a. Jumlah usaha/kegiatan/industri yang wajib UPL-UKL b. Jumlah usaha/kegiatan/industri yang wajib AMDAL c. Jumlah kasus UPL-UKL d. Jumlah kasus AMDAL e. Hasil pengujian air terhadap nilai baku mutu f. Hasil pengujian udara terhadap nilai baku mutu g. Jumlah sarana pengendalian lingkungan h. Jumlah sarana pemantauan kualitas lingkungan i. Jumlah sarana perlindungan fungsi lingkungan
2.	Konservasi Sumber Daya Alam	a. Luas lahan kritis di Kabupaten Rembang b. Persentase lahan kritis yang tertangani c. Persentase luas Ruang Terbuka Hijau terhadap luas wilayah
3.	Penegakan Hukum Lingkungan	a. Jumlah kasus lingkungan hidup yang terjadi b. Persentase kasus lingkungan hidup yang tertangani

**INDIKATOR KINERJA UTAMA  
KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP**

Instansi : Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Rembang

Tugas : Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perpustakaan dan arsip.

Fungsi : 1 Perumusan kebijakan teknis di bidang perpustakaan dan kearsipan;  
2 Penyelenggaraan pemerintah di daerah bidang perpustakaan dan kearsipan;  
3 Pembinaan teknis di bidang perpustakaan dan kearsipan;  
4 Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang perpustakaan dan kearsipan;  
5 Penyelenggaraan ketatausahaan kantor.

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama
1.	Meningkatnya koleksi bahan pustakaan	a. Jumlah koleksi buku manual b. Jumlah koleksi pustaka digital c. Jumlah buku cerita sejarah yang dilestarikan d. Jumlah buku cerita rakyat yang dilestarikan e. Jumlah pustakawan
2.	Terwujudnya pelayanan Perpustakaan Umum dengan kualitas pelayanan prima	a. Jumlah anggota perpustakaan b. Jumlah pengurus c. Jumlah pengunjung/peminjam perpustakaan d. Jumlah pustakawan e. Jumlah lembaga yang terbina perpustakaannya.
3.	Membudayakan minat baca masyarakat dan cinta buku	a. Jumlah peserta pameran buku b. Jumlah pengunjung pameran buku c. Jumlah oplah penjualan buku
4.	Terwujudnya penyelenggaraan dan pengelolaan Kearsipan yang berkualitas, modern dengan memanfaatkan Tehnologi Informasi	a. Jenis arsip yang terdokumentasikan b. Jumlah arsip yang dilestarikan dan diselamatkan c. Jumlah lembaga yang terbina kearsipannya d. Jumlah arsip yang diproses sesuai dengan JRA ( Jadwal Retensi Arsip ). e. Jumlah Arsiparis

**INDIKATOR KINERJA UTAMA  
KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU**

Instans: Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Rembang

Tugas : Melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi dibidang perijinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, keamanan dan kepastian serta melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang penanaman modal di daerah

Fungsi : 1. Pelaksanaan Penyusunan Program Kantor;  
2. Penyelenggaraan pelayanan administrasi perijinan dan penanaman modal;  
3. Pelaksanaan koordinasi proses pelayanan perijinan dan penanaman modal;  
4. Pelaksanaan administrasi pelayanan perijinan dan penanaman modal;  
5. Pemantauan dan evaluasi proses pemberian pelayanan perijinan dan penanaman modal;  
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati dibidang pelayanan perijinan dan penanaman modal.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
1.	Meningkatnya pelayanan perijinan dan non perijinan	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Penyelesaian perijinan terhadap waktu yang telah ditentukan</li><li>b. Indeks kepuasan masyarakat/pelaku usaha terhadap pelayanan perijinan dan non perijinan</li><li>c. Jumlah pengaduan masyarakat terhadap penertiban perijinan dan non perijinan</li></ul>
2.	Meningkatnya investor dalam melakukan penanaman modal	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Jumlah perusahaan yang terdaftar yang bergerak disektor perdagangan</li><li>b. Jumlah perusahaan yang terdaftar yang bergerak disektor perindustrian</li><li>c. Jumlah perusahaan yang tedaftar yang bergerak dibidang luar sektor perdagangan dan perindustrian (bentuk usaha lain)</li><li>d. Jumlah industri bersekalai besar</li><li>e. Nilai investasi dibidang industri</li><li>f. Nilai investasi dibidang perdagangan</li><li>g. Nilai investasi diluar bidang industri dan perdagangan (bentuk usaha lainnya)</li></ul>

**INDIKATOR KINERJA UTAMA**  
**RSUD dr. R. SOETRASNO KABUPATEN REMBANG**

Instansi : RSUD dr. R. SOETRASNO KABUPATEN REMBANG  
 Tugas : Memberikan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna  
 Fungsi :

- 1 Penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar kesehatan sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit;
- 2 Pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan medis;
- 3 Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan;
- 4 Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penampisan teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang kesehatan.

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama
1	Meningkatnya Jumlah Kunjungan Pasien dan Informasi Pelayanan RS	a. Persentase Peningkatan Kunjungan Rawat Jalan b. Persentase Peningkatan Kunjungan Rawat Inap
2	Peningkatan Standar Pelayanan Kesehatan	Persentase Penyusunan Dokumen BLUD, Dokumen Akreditasi dan Standar Pelayanan Kesehatan
3	Terpenuhinya penguburan Jenazah Jumlah Korban Terlantar, Gelandangan dan Orang Miskin yang tidak mempunyai Keluarga	Persentase peningkatan pelayanan penguburan jml korban terlantar, Gelandangan dan Orang Miskin yang tidak mempunyai Keluarga
4	Terpenuhinya Peningkatan Sarpras untuk pelayanan publik	a. Persentase Penambahan Sarpras Pelayanan Publik yang memadai b. Persentase Pengembangan ruang IGD c. Persentase pengadaan persediaan Obat-Obatan, bahan logistik d. Peningkatan penambahan alat-alat kedokteran
5	Terwujudnya Sarpras Pelayanan Publik yang memadai	Persentase berfungsinya Sarpras pelayanan publik yang memadai
6	Meningkatnya jumlah Mitra untuk meningkatkan Dokter Residen/Dokter Spesial dan Bank Darah RS	a. Persentase peningkatan kimitraan RS Jiwa b. Persentase peningkatan jumlah tenaga medis dan paramedis RS c. Bank Darah : Pemenuhan kebutuhan darah rumah sakit
7	Memberikan pelayanan kepada korban KDRT dan memfasilitasi	Jumlah pertemuan/koordinasi dalam 1 tahun
8	Meningkatkan Mutu Pelayanan Rumah Sakit	a. Average Length of Stay (Av LOS) : rata-rata rawatan seorang pasien b. Nrt Death Rate (NDR) : Angka kematian > dari 48 jam setelah rawat c. Gross Death Rate (GDR) : Angka Kematian Umum d. Angka Keterlambatan Pelayanan Pertama Gawat Darurat e. Angka pasien dengan Dekubitus f. Angka Kejadian Infeksi dengan Jarum Infus g. Infeksi luka operasi h. Angka Kematian Pasien Gawat Darurat i. Angka Masa Tunggu Sebelum Operasi elektrif (AMSOE) j. Angka Seksio Sesarea k. Angka Kematian Pasien Rawat Inap Intensif l. Angka Kematian Ibu Karena Perdarahan m. Angka Kematian Ibu Karena Eklamsia n. Angka Kematian Ibu Karena Sepsis

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama
9	Peningkatan Pemanfaatan Sarana Rumah Sakit	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Bed Occupancy Rate (BOR) : Persentase pemakaian tempat tidur pada satu tahun</li> <li>b. Rata - rata Kunjungan Poliklinik per hari : jumlah kunjungan poliklinik dibagi jumlah hari buka klinik ; indikator ini dipakai menilai tingkat pemanfaatan poliklinik rumah sakit</li> <li>c. Cakupan Pelayanan Poliklinik Rumah Sakit : angka rata - rata kunjungan poliklinik perhari dibandingkan dengan jumlah penduduk</li> <li>d. Kebutuhan Air Minum dan Air Bersih Rumah Sakit Pertahun dengan Jumlah TT</li> <li>e. Persentase item obat yang tersedia terhadap item obat dalam formularium</li> <li>f. Rata-rata Persalinan perhari</li> <li>g. Gizi : Persentase Penyediaan Makanan Khusus</li> <li>h. Radiologi : Persentase pemeriksaan dari luar rumah sakit</li> <li>i. Angka ketidaklengkapan pengisian catatan medik</li> <li>j. Laboratorium : Rata-rata jumlah pemeriksaan perhari</li> <li>k. Bank Darah : Pemenuhan Kebutuhan Darah Rumah Sakit</li> </ul>

## INDIKATOR KINERJA UTAMA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

- Instansi : Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rembang
- Tugas : Memelihara dan menyelenggarakan ketentraman masyarakat dan ketertiban umum, menegakkan peraturan daerah dan keputusan kepala daerah
- Fungsi :
1. Penyusunan program dan pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum, Penegakan peraturan daerah dan keputusan kepala daerah;
  2. Pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di daerah;
  3. Pelaksanaan kebijakan penegakan peraturan daerah dan keputusan kepala daerah;
  4. Pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan peraturan daerah, keputusan kepala daerah dengan aparat kepolisian negara, penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) dan atau aparatur lainnya;
  5. Pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan mentaati peraturan daerah dan keputusan kepala daerah.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama
1.	Terwujudnya Sumber Daya Aparatur Satpol yang berkualitas	<ol style="list-style-type: none"><li>a. Persentase anggota Satpol yang memenuhi syarat kualifikasi dan kompetensi</li><li>b. Jumlah anggota Satpol se Kabupaten Rembang</li><li>c. Rasio jumlah Pol.PP per 10.000 penduduk Kabupaten Rembang</li></ol>
2.	Meningkatnya Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"><li>a. Jumlah kasus kriminalitas</li><li>b. Jumlah Demo</li><li>c. Jumlah bencana alam</li><li>d. Jumlah kasus pelanggaran pekat</li><li>f. Jumlah pertikaian antar warga (SARA)</li></ol>
3.	Terlaksananya Perda secara optimal	<ol style="list-style-type: none"><li>a. Jumlah pelanggaran perda</li><li>b. Persentase pelanggaran perda yang dapat diselesaikan</li></ol>

**INDIKATOR KINERJA UTAMA  
KECAMATAN**

- Tugas : Melaksanakan tugas umum pemerintahan dan kewenangan Pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian Otonomi Daerah
- Fungsi :
1. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat
  2. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
  3. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum
  4. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan
  5. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan
  6. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan
  7. Evaluasi dan pelaporan bidang tugas umum pemerintahan dan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Bupati
  8. Pelaksanaan kesekretariatan kecamatan
  9. Pelaksanaan Tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
1	Meningkatnya kuantitas dan kualitas pelayanan publik	a. Jumlah pelayanan KTP a. Waktu pembuatan KTP b. Jumlah pelayanan KK c. Waktu pembuatan KK d. Jumlah pelayan akte kelahiran e. Waktu Pembuatan Akte Kelahiran f. Jumlah KK miskin yang mendapatkan raskin g. Jumlah KK miskin yang memanfaatkan kartu askin h. Jumlah pelayanan PPAT i. Waktu penerbitan sertifikat tanah j. Persentase desa memiliki sarana prasarana administrasi perkantoran yang baik
2	Meningkatnya pembinaan kepada masyarakat	a. Jumlah desa yang rawan konflik b. Jumlah desa yang rawan bencana c. Jumlah pembinaan penanggulangan bencana d. Persentase pelaksanaan pembinaan

		<p>kegiatan keamanan lingkungan</p> <p>e. Persentase pelunasan PBB</p> <p>f. Jumlah desa mendapat pembinaan administrasi pemerintahan desa</p>
3	Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan	<p>a. Persentase pemerintah desa yang telah melaksanakan tupoksi dengan baik</p> <p>b. Jumlah pengisian kekosongan perangkat desa</p> <p>c. Jumlah desa yang telah menyusun RPJMDes</p> <p>d. Persentase desa yang telah terpenuhi perangkat desa</p>